

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENATAAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DI KITA CIMAHI

Daniel Marten Patty¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Transportasi angkutan umum di Kota Cimahi hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemacetan pada ruas jalan utama, trayek yang belum tertata secara optimal, kondisi sebagian armada yang kurang layak, hingga keterbatasan terminal dan halte. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat cenderung beralih menggunakan kendaraan pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang diterapkan Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam menata transportasi angkutan umum, dengan menggunakan teori strategi sektor publik dari John M. Bryson (2018) yang mencakup analisis kondisi, perumusan kebijakan, implementasi program, serta pengawasan dan evaluasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri atas pejabat Dinas Perhubungan, petugas operasional, pengurus ORGANDA, pengemudi angkutan umum, serta masyarakat pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan mulai mengarahkan strategi penataan transportasi menuju sistem yang lebih terintegrasi, salah satunya melalui rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya beserta angkutan feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan jaringan utama. Meski demikian, keberhasilan strategi ini masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, koordinasi antarpihak, serta konsistensi pengawasan dan evaluasi di lapangan.

Kata Kunci: strategi; Dinas Perhubungan; transportasi angkutan umum; BRT; feeder

Abstract

Public transportation in Cimahi City still faces a number of problems, ranging from congestion on main roads and poorly arranged routes to inadequate fleet conditions and limited terminals and shelters. These conditions have led part of the community to prefer using private vehicles. This study aims to analyze the strategy applied by the Cimahi City Transportation Agency (Dinas Perhubungan) in organizing public transportation, using John M. Bryson's (2018) public sector strategy theory, which covers condition analysis, policy formulation, program implementation,

and monitoring and evaluation. This research employs a descriptive qualitative method, with data gathered through observation, semi-structured interviews, and documentation involving nine informants, consisting of agency officials, field officers, the ORGANDA association, public transport drivers, and passengers. The findings indicate that the Transportation Agency has begun directing its strategy toward a more integrated transportation system, particularly through the planned development of the Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT) and feeder services connecting residential areas to the main network. However, the success of this strategy still depends heavily on infrastructure readiness, coordination among stakeholders, and consistent monitoring and evaluation in the field.

Keywords: *strategy; transportation agency; public transportation; BRT; feeder*

PENDAHULUAN

Transportasi publik menjadi salah satu penopang utama aktivitas masyarakat perkotaan. Ketika sistem angkutan umum tertata dengan baik, dampaknya bukan hanya pada efisiensi waktu tempuh, tetapi juga pada berkurangnya kemacetan dan menurunnya polusi udara. Ortúzar dan Willumsen (1994) menyebut transportasi publik sebagai sistem yang melayani masyarakat luas dengan ciri khas rute tetap, jadwal tetap, dan tarif yang relatif terjangkau.

Kota Cimahi termasuk wilayah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data opendata.cimahikota.go.id, jumlah penduduk Kota Cimahi pada 2019 tercatat 553.775 jiwa dan meningkat menjadi 581.994 jiwa pada 2024, atau bertambah sekitar 5.643 jiwa per tahun. Pertumbuhan penduduk seperti ini, menurut Tamin (2019), berkorelasi langsung dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan urbanisasi, yang pada akhirnya mendorong kebutuhan pergerakan masyarakat semakin tinggi. namun, kondisi transportasi angkutan umum di Kota Cimahi belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Sejumlah persoalan masih terlihat di lapangan: kemacetan pada ruas-ruas jalan utama seperti Jalan Daeng Ardiwinata, Jalan Kolonel Masturi, dan Jalan Jenderal

Amir Machmud; trayek angkutan yang belum tertata rapi; kualitas sebagian armada yang kurang layak jalan; serta fasilitas terminal

dan halte yang masih terbatas. Keterbatasan lahan membuat pembangunan terminal menjadi sulit, sehingga tidak jarang angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal dan justru menambah kemacetan.

Perparkiran turut menjadi persoalan tersendiri. Dinas Perhubungan Kota Cimahi tercatat telah menetapkan 93 titik parkir di badan jalan (Renstra Dishub Kota Cimahi), namun penggunaan badan jalan untuk parkir ini pada praktiknya justru mempersempit kapasitas jalan dan berpotensi memicu antrean kendaraan. Sukarto (2006) menjelaskan bahwa peralihan masyarakat dari angkutan umum ke kendaraan pribadi umumnya dipicu oleh beberapa hal, di antaranya pelayanan angkutan umum yang belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan aktivitas ekonomi, tidak tersedianya angkutan pengumpan menuju jalur utama, serta kurangnya jaminan keamanan dan ketepatan waktu.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai strategi pemerintah daerah dalam menata transportasi publik sejauh ini lebih banyak mengambil lokasi di kota besar seperti Bandung, sementara kajian yang secara khusus membahas strategi Dinas Perhubungan di kota penyangga seperti Cimahi masih relatif jarang ditemukan. Padahal, Cimahi memiliki karakteristik tersendiri sebagai kota lintasan yang menghubungkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, sehingga persoalan transportasinya tidak bisa disamakan begitu saja dengan kota-kota besar tersebut. Kesenjangan kajian inilah yang mendasari penelitian ini, dengan tujuan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam menata transportasi angkutan umum, sekaligus melihat hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian

bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana Dinas Perhubungan Kota Cimahi menyusun dan menjalankan strategi penataan transportasi angkutan umum. Sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2022), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan analisis data dilakukan secara induktif.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata Nomor 387, Kota Cimahi. Informan penelitian ditentukan secara purposif dan terdiri atas sembilan orang, yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, satu orang petugas operasional Dinas Perhubungan, pengurus ORGANDA Kota Cimahi, dua orang pengemudi angkutan umum, serta tiga orang masyarakat pengguna angkutan umum. Pemilihan informan ini didasarkan pada keterlibatan langsung masing-masing pihak dalam proses penataan maupun penggunaan transportasi angkutan umum di Kota Cimahi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu observasi langsung terhadap kondisi transportasi di lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan seluruh informan, dan dokumentasi berupa data resmi Dinas Perhubungan serta regulasi terkait. Ketiga teknik ini kemudian dipadukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk menjaga keabsahan data, mengikuti prosedur yang dikemukakan Moleong (2021).

Analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2022). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan empat tahap strategi menurut Bryson (2018), yaitu analisis kondisi, perumusan kebijakan, implementasi program, serta pengawasan dan evaluasi, sebelum akhirnya disusun

menjadi kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Merujuk pada teori strategi sektor publik yang dikemukakan Bryson (2018), strategi Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam menata transportasi angkutan umum dapat dilihat melalui empat tahap yang saling berkaitan, yaitu analisis kondisi, perumusan kebijakan, implementasi program, serta pengawasan dan evaluasi.

Analisis Kondisi

Kondisi transportasi Kota Cimahi tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai kota penyangga Bandung Raya. Jaringan jalan di Cimahi menjadi bagian dari pergerakan masyarakat menuju Kota Bandung, Kabupaten Bandung, maupun Kabupaten Bandung Barat, sehingga beban lalu lintas pada beberapa ruas jalan utama cenderung tinggi. Selain kemacetan, kualitas pelayanan angkutan umum juga menjadi sorotan, mulai dari kondisi kendaraan, lamanya waktu berhenti, hingga kedisiplinan pengemudi dalam menaati aturan lalu lintas.

“Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum tidak hanya berkaitan dengan tersedianya kendaraan, tetapi juga mencakup aspek keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan kepastian waktu perjalanan.” (Ajat Sudrajat, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Cimahi, wawancara 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Dinas Perhubungan sudah cukup memahami bahwa persoalan transportasi Cimahi bukan sekadar soal jumlah kendaraan, melainkan menyangkut kualitas pelayanan secara menyeluruh. Jika dikaitkan dengan tahap pertama dalam teori Bryson, temuan ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan pembacaan kondisi lingkungan sebelum menentukan arah kebijakan, sesuatu yang menurut Bryson (2018) menjadi dasar penting agar kebijakan yang dihasilkan nantinya tepat sasaran.

Perumusan Kebijakan

Pada tahap perumusan kebijakan, arah penataan transportasi Cimahi tidak dirancang secara terpisah dari kawasan sekitarnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi menjelaskan hal ini dalam wawancara:

“Arah kebijakan penataan transportasi di Kota Cimahi dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan Kota Cimahi dengan sistem transportasi kawasan Bandung Raya, karena pergerakan masyarakat Kota Cimahi tidak dapat dipisahkan dari perjalanan menuju Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.” (Endang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, wawancara 2026)

Kebijakan yang dirumuskan kemudian diarahkan pada pengembangan sistem transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang berfungsi sebagai jaringan penghubung antarwilayah, serta feeder yang berperan menghubungkan kawasan permukiman dengan jaringan utama tersebut. Untuk wilayah Cimahi sendiri, rencana ini terbagi ke dalam dua koridor BRT, yaitu Alun-Alun Bandung–Padalarang dan Cicaheum–Stasiun Cimahi, serta dua feeder, yaitu Cimahi–Parongpong dan Cimahi–Soreang. Pola pembagian fungsi semacam ini sejalan dengan pandangan Chandler (1962) bahwa strategi pada dasarnya adalah penetapan tujuan jangka panjang yang diterjemahkan ke dalam tindakan dan alokasi sumber daya yang terarah.

Implementasi Program

Pada tahap implementasi, rencana BRT dan feeder mulai diwujudkan melalui pembagian sistem pelayanan on corridor untuk wilayah Kota Bandung dan off corridor untuk wilayah penyangga, termasuk Cimahi. Menariknya, keberadaan feeder tidak lantas menyingkirkan angkot yang selama ini beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan menegaskan hal tersebut: *“Angkot tidak akan dihapus, angkot yang masih beroperasi itu akan*

dimanfaatkan sebagai feeder dengan sistem penyewaan oleh operator, sehingga para sopir tetap memiliki kepastian penghasilan.” (Endang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, wawancara 2026)

Pernyataan ini muncul sebagai jawaban atas kekhawatiran yang disampaikan salah seorang sopir angkot yang diwawancarai, yang mengaku cemas rencana BRT akan semakin menggerus penghasilan mereka setelah sebelumnya harus bersaing dengan transportasi daring. Di sinilah terlihat bahwa implementasi strategi tidak berjalan searah dari atas ke bawah semata, tetapi juga berusaha mengakomodasi kekhawatiran pelaku transportasi di lapangan, meskipun tentu masih perlu dibuktikan melalui pelaksanaan yang konsisten. Kabid Lalu Lintas Dishub menambahkan bahwa peralihan angkutan umum menjadi feeder diharapkan dapat menjadi solusi bagi operator sekaligus pengguna. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi program tidak berhenti pada penyediaan armada baru, tetapi juga menyangkut pengaturan kelembagaan antara pemerintah dan operator yang sudah ada.

Pengawasan, Evaluasi, serta Hambatan dan Solusi

Keberhasilan sebuah program tidak cukup dinilai dari sekadar tersedianya jaringan pelayanan. Bryson (2018) menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana strategi benar-benar menjawab kebutuhan yang menjadi dasar kebijakan tersebut disusun. Dalam konteks BRT dan feeder di Cimahi, evaluasi ke depan idealnya tidak hanya melihat apakah kendaraan sudah beroperasi, tetapi juga sejauh mana feeder mampu menjangkau kawasan yang selama ini sulit diakses transportasi umum.

Sejumlah hambatan masih perlu diantisipasi, terutama keterbatasan lahan untuk fasilitas terminal, tingginya harga lahan di pusat kota, serta padatnya lalu lintas akibat bercampurnya berbagai moda transportasi di ruas jalan yang sama. Karena sistem

BRT dan feeder melibatkan lebih dari satu wilayah administratif, koordinasi antarpihak, mulai dari pemerintah kota, operator, hingga instansi terkait di kawasan Bandung Raya, menjadi kunci agar program ini tidak berhenti sebagai rencana di atas kertas.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan penelitian Ramdhana (2025) yang mengkaji strategi Trans Metro Bandung, penelitian ini memperlihatkan pola yang agak berbeda. Ramdhana menemukan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena manfaatnya belum terlalu dirasakan masyarakat, sementara di Cimahi strategi penataan justru baru berada pada tahap perencanaan dan awal implementasi, sehingga belum bisa dinilai keberhasilannya secara penuh. Sementara itu, penelitian Raihan (2025) lebih menyoroti peran Dinas Perhubungan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator, sedangkan penelitian ini mencoba melihat lebih jauh ke proses penyusunan strategi itu sendiri, mulai dari analisis kondisi hingga rencana pengawasannya. Adapun penelitian Bulan (2024) di Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa penanganan kemacetan di sana masih berpatokan pada prosedur operasi standar yang belum sepenuhnya optimal, sedikit berbeda dengan pendekatan Cimahi yang mulai mengarah pada pengembangan sistem transportasi massal berbasis jaringan.

Secara umum, ketiga penelitian terdahulu tersebut sama-sama menegaskan bahwa peran strategis Dinas Perhubungan sangat menentukan keberhasilan penataan transportasi, namun belum banyak yang mengkaji proses perumusan strategi itu sendiri secara menyeluruh. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada upaya melihat proses tersebut secara utuh, mulai dari analisis kondisi sampai rencana pengawasannya, sekaligus mengaitkannya dengan aspek keamanan, kenyamanan, dan kepastian waktu sebagai tiga hal yang paling sering dikeluhkan pengguna angkutan

umum di Cimahi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam menata transportasi angkutan umum mulai bergeser dari sekadar mengatur angkutan umum yang sudah ada menuju pembentukan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Tahap analisis kondisi memperlihatkan bahwa persoalan utama yang dihadapi Cimahi adalah kemacetan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya akses masyarakat dari kawasan permukiman menuju jaringan transportasi utama. Persoalan-persoalan tersebut kemudian direspons melalui perumusan kebijakan yang mengarahkan pengembangan BRT Bandung Raya sebagai jaringan penghubung antarwilayah dan feeder sebagai jaringan pengumpan, yang untuk wilayah Cimahi diwujudkan melalui dua koridor BRT dan dua rute feeder. Pada tahap implementasi, angkot yang sudah ada tidak dihapuskan, melainkan diarahkan menjadi bagian dari sistem feeder, sehingga operator dan pengemudi tetap memiliki kepastian penghasilan. Meski demikian, keberhasilan strategi ini masih sangat bergantung pada pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, kesiapan infrastruktur pendukung, serta koordinasi antarpihak, mengingat sistem BRT dan feeder ini melibatkan lebih dari satu wilayah administratif di kawasan Bandung Raya. Dengan kata lain, rencana pengembangan BRT dan feeder baru merupakan langkah awal, dan keberlanjutannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi Dinas Perhubungan dalam menjaga proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan program ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Bulan, R. (2024). Strategi Dinas Perhubungan dalam manajemen penanganan kemacetan sebagai upaya peningkatan pelayanan kebutuhan lalu lintas di Kabupaten Majalengka [Skripsi, Universitas Majalengka].
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise*. MIT Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Mintzberg, H. (1994). *The rise and fall of strategic planning*. Free Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ortúzar, J. de D., & Willumsen, L. G. (1994). *Modelling transport* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Raihan, R. M. (2025). Peran Dinas Perhubungan dalam penataan transportasi angkutan umum di Kota Cimahi [Skripsi, Universitas Jenderal Achmad Yani].
- Ramdhana, F. (2025). Strategi pemerintah dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Bandung [Skripsi, Universitas Pasundan].
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sukarto, H. (2006). Peralihan pengguna angkutan umum ke kendaraan pribadi. *Jurnal Transportasi*.
- Tamin, O. Z. (2019). *Perencanaan dan pemodelan transportasi*. Penerbit ITB. Republik Indonesia. (2009).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.